



Pemkot Bentuk Komisi Penanggulangan Zoonosis

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membentuk Komisi Pengendalian Zoonosis untuk mengantisipasi dan mengendalikan berbagai penyakit yang ditularkan hewan. Adapun komisi tersebut berisi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Seksi Pengendalian Penyakit,

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Endang Sri Rahayu mengatakan. Komisi Pengendalian Zoonosis selain terdiri dari unsur Dinkes, juga berasal dari BPBD, BLH, Diperindagkoptan, Dinas Pendidikan, hingga Disparbud.

"Pembentukan komisi ini untuk mengantisipasi dan mengendalikan penyakit yang

● ke halaman 14

Pemkot Bentuk Komisi

● Sambungan Hal 13

ditularkan hewan. Komisi ini untuk mengantisipasi wabah yang lebih besar dari penyakit zoonosis," kata Endang, Kamis (21/7).

Dia menyebut, jenis penyakit yang ditularkan hewan, misalnya ialah leptospirosis, rabies, hingga Demam Berdarah Dengue (DBD). Menurutnya jika penyakit tersebut tak kunjung dikendalikan, maka dituduhkan terdapat warga yang menjadi korban penyakit itu. "Misalnya pada awal 2014, ada empat orang

di satu wilayah yang meninggal dunia karena leptospirosis. Komisi ini untuk mengantisipasi. Kalau ada yang terjangkit, komisi ini akan mengendalikan agar tak ada yang meninggal dunia," ucapnya.

Endang pun memaparkan, jumlah kasus zoonosis seperti leptospirosis tak begitu banyak di Kota Yogyakarta, berdasar catatannya sekitar empat kasus. Namun kasus DBD di Kota Yogyakarta, menurutnya cukup banyak karena mencapai 862 kasus.

Diungkapkannya dalam komisi ini, tiap SKPD memiliki kewenangan yang berbeda, namun saling mendukung dan mengutkan. Misal-

nya BLH menangani sampah agar tidak menimbulkan penyakit, dan Diperindagkoptan melakukan penanganan ke hewan.

"Keberadaan Komisi Penanggulangan Zoonosis dikuatkan dengan Perwal Yogyakarta nomor 36/2016, dan menjadi komisi penanggulangan zoonosis pertama di DIY," jelas Endang.

Adapun tugas Komisi Zoonosis Yogyakarta sendiri, menurutnya ialah menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk mengendalikan zoonosis. Selain itu, komisi tersebut juga bertugas menghimpun sumber dana dari pusat, daerah, masyarakat, maupun luar negeri. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005